

PENGARUH ANGGARAN BERBASIS KINERJA DAN SISTEM PELAPORAN KEUANGAN TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA PADA DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA PROVINSI JAWA TIMUR

Irma Zuanita¹, Yuli Kurnia Firdausia²

Universitas PGRI Adi Buana Surabaya

Email : irmazuanita2800@gmail.com ¹, virdajulie9@gmail.com ²

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui anggaran berbasis kinerja dan sistem pelaporan keuangan terhadap akuntabilitas kinerja pada dinas pekerjaan umum bina marganya provinsi jawa timur. Jenis penelitian ini menggunakan kuantitatif dengan populasi yang di gunakan adalah keseluruhan karyawan dinas pekerjaan umum bina marganya provinsi jawa timur, kemudian sampel yang digunakan menggunakan keseluruhan jumlah populasi sebanyak 34 responden. Semua perhitungan menggunakan SPSS Ver.26, hasil menunjukkan jika Anggaran Berbasis Kinerja berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja sebesar $(0,030 < 0,05)$ dan Sistem Pelaporan Keuangan berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja sebesar $(0,468 < 0,05)$ sehingga seluruh variabel independent berpengaruh secara simultan yang memperoleh nilai F-hitung sebesar 18,324 dengan nilai signifikan sebesar 0,000 terhadap Akuntabilitas Kinerja. Semakin meningkatnya Anggaran Berbasis Kinerja dan Sistem Pelaporan Keuangan maka dapat meningkatkan Akuntabilitas Kinerja.

Kata kunci: Anggaran Berbasis Kinerja, Sistem Pelaporan Keuangan, Akuntabilitas Kinerja

ABSTRACT

This study aims to determine the performance-based budgeting and financial reporting system on performance accountability at the Public Works Department of Bina Marga, East Java Province. This type of research uses quantitative with the population used is all employees of the Public Works Department of Bina Marga, East Java Province, then the sample used is the total population of 34 respondents. All calculations using SPSS Ver.26, the results show that the Performance-Based Budget has a significant effect on Performance Accountability $(0.030 < 0.05)$ and the Financial Reporting System has a significant effect on Performance Accountability $(0.468 < 0.05)$ so that all independent variables have a significant effect on Simultaneous obtaining an F-count value of 18,324 with a significant value of 0.000 on Performance Accountability. The increase in Performance-Based Budgeting and Financial Reporting Systems can increase Performance Accountability.

Keywords : Performance Based Budgeting, Financial Reporting System, Performance Accountability

PENDAHULUAN

Sejalan dengan yang diamanatkan dalam undang-undang No. 17 tahun 2003 tentang perimbangan keuangan Negara akan pula diterapkan secara penuh anggaran berbasis kinerja di sektor publik agar penggunaan anggaran tersebut bisa dinilai kemanfaatan dan kegunaannya oleh masyarakat. Undang-undang No. 17 tahun 2003 menetapkan bahwa APBD disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang akan dicapai. Untuk mendukung kebijakan ini perlu dibangun suatu sistem yang dapat menyediakan data dan informasi untuk menyusun APBD dengan pendekatan kinerja Anggaran kinerja pada dasarnya merupakan sistem penyusunan dan pengelolaan anggaran daerah yang berorientasi pada pencapaian hasil atau kinerja. Adapun kinerja tersebut harus mencerminkan efisiensi dan efektifitas pelayanan publik, yang berarti harus berorientasi pada kepentingan publik. Melalui kemendagri No. 13 tahun 2006 implementasi pradigma baru yang

berorientasi pada prestasi kinerja dapat diterapkan dalam penyusunan APBD, baik dalam sistem akuntansi dan pengelolaan keuangan daerah.

Di era sekarang ini, pemerintah telah melakukan hal-hal penting untuk memperbaiki berbagai kelemahan dan kekurangan yang terjadi, serta upaya untuk mengakomodasi dengan berbagai tuntutan yang berkembang di daerah dan masyarakat. Dalam penggunaan anggaran baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah seringkali tercermin dari kinerja organisasi sektor publik yang tergambar tidak produktif, tidak efisien, dan rendah kualitas. Anggaran berbasis kinerja merupakan anggaran yang menekankan pada prestasi kerja atau hasil. Dalam membuat anggaran berbasis kinerja pemerintah daerah terlebih dulu harus memiliki renstra (perencanaan strategis) yang disusun dengan objektif dan juga melibatkan seluruh komponen yang ada didalam pemeritahan. Dengan adanya sistem tersebut pemerintah daerah diyakini akan dapat mengukur kinerja keuangannya yang tergambar dalam anggaran pendapatan dan belanja daerahnya. Tujuan umum pelaporan keuangan sektor publik adalah memberikan informasi mengenai posisi keuangan kinerja dan arus kas suatu entitas yang berguna bagi sejumlah besar pemakai (wide range users) untuk membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya yang dipakai suatu entitas dalam aktivitasnya guna mencapai tujuan. Akuntabilitas diyakini mampu mengubah kondisi pemerintahan yang tidak dapat memberikan pelayanan publik secara baik dan menuju suatu tatanan pemerintahan yang demokratis. Penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel akan mendapat dukungan dari publik. Ada kepercayaan masyarakat atas apa yang diselenggarakan oleh program yang berorientasi kepada publik.

Dinas PU Bina Marga adalah salah satu SKPD yang ada di Pemerintahan Provinsi Jawa Timur dengan tugas pokok dan fungsi dinas adalah menyelenggarakan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur di bidang jalan dan jembatan yang dijabarkan dalam bentuk program/kegiatan yang ada di dinas. Untuk melaksanakan program/kegiatan tersebut diperlukan anggaran yang cukup besar sehingga hasil dari program/kegiatan tersebut dapat dinikmati masyarakat. Terwujudnya prasarana jalan dan jembatan yang baik merupakan salah satu kebutuhan yang vital bagi masyarakat. Terciptanya pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan sehingga dapat merata dan dinikmati oleh masyarakat tentu harus didukung oleh peran serta pemerintah dalam menyediakan anggaran yang memadai untuk membiayai program pembangunan tersebut.

TINJAUAN PUSTAKA & HIPOTESIS

Anggaran Berbasis Kinerja (X1)

Anggaran berbasis kinerja berorientasi kepada pendayagunaan dana yang tersedia untuk mencapai hasil yang optimal dari kegiatan yang dilaksanakan. Sistem penyusunan anggaran ini selain berdasarkan apa yang dibelanjakan, juga didasarkan kepada tujuan-tujuan atau rencana tertentu, dan untuk pelaksanaannya perlu didukung oleh suatu anggaran biaya yang cukup dan biaya yang dipakai tersebut harus dijalankan secara efektif dan efisien. Sehingga dalam sistem anggaran

berbasis kinerja ini bukan semata-mata berorientasi kepada berapa jumlah yang dikeluarkan, tetapi sudah dipikirkan terlebih dahulu mengenai rencana kegiatan, apa yang akan dicapai, proyek apa yang akan dikerjakan, dan bagaimana pengalokasian biaya agar digunakan secara efektif dan efisien (Wahdatul, Rahayu, Dillak, 2016).

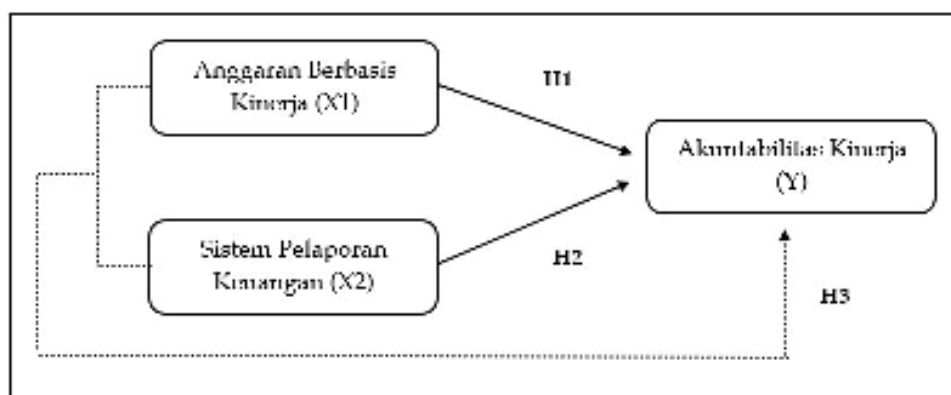
Anggaran berbasis kinerja merupakan metode penganggaran bagi Akuntansi untuk mengaitkan setiap biaya yang dituangkan dalam kegiatan-kegiatan dengan manfaat yang dihasilkan. Manfaat tersebut dideskripsikan pada seperangkat tujuan dan sasaran yang dituangkan dalam target kinerja pada setiap unit kerja. Anggaran berbasis kinerja yang efektif akan mengidentifikasi keterkaitan antara nilai uang dan hasil, serta dapat menjelaskan bagaimana keterkaitan tersebut dapat terjadi yang merupakan kunci pengelolaan program secara efektif. Jika terjadi perbedaan antara rencana dan realisasinya dengan output dan outcome untuk menentukan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program (Verasvera, 2016)."

Sistem Pelaporan Keuangan (X2)

Sistem pelaporan merupakan laporan yang digunakan untuk mempertanggungjawabkan dari bawahan kepada atasan. Sistem pelaporan yang baik diperlukan agar dapat memantau dan mengendalikan kinerja dalam mengimplementasikan anggaran yang telah diterapkan. Agar dapat memantau hasil kerja dan pertanggungjawaban diperlukan sebuah sistem pelaporan. Dalam laporan harus ditunjukkan hasil kerja pusat pertanggungjawaban beserta anggarannya, sehingga dapat diketahui penyimpangan terhadap anggaran. Agar bisa lebih manfaat dengan analisis tentang penyebab timbulnya penyimpangan. Dapat dikatakan bahwa sistem pelaporan akan mempengaruhi efektivitas dan efisiensi sistem pengendalian Akuntansi (Mulyadi, Syamsidar, Efendy, 2018)

Akuntansi dan laporan keuangan mengandung pengertian sebagai suatu proses pengumpulan dan pengelolaan informasi yang bermanfaat untuk pembuatan keputusan dan untuk menilai kinerja organisasi. Sistem merupakan kumpulan elemen-elemen baik yang berbentuk fisik maupun bukan fisik yang menunjukkan suatu kumpulan saling berhubungan diantaranya dan berinteraksi bersama-sama menuju satu atau lebih tujuan, sasaran atau akhir dari sistem. Sedangkan pelaporan keuangan meliputi aspek yang berkaitan dengan penyediaan dan penyampaian informasi keuangan (Amalia, 2017)

Kerangka Konseptual



Gambar 1. Kerangka Konseptual

Hipotesis

Dengan gambar kerangka konseptual di atas, maka dapat ditarik kesimpulan hipotesis pada penelitian yang dilakukan yaitu :

1. H1 : Anggaran berbasis kinerja berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja.
2. H2 : Sistem pelaporan keuangan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja.
3. H3 : Anggaran berbasis kinerja dan sistem pelaporan keuangan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja.

METODE PENELITIAN

Populasi dan Sampel

Karyawan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur digunakan sebagai populasi dan sampel sebanyak 34 orang.

Teknik Pengambilan Sampel

.Pengambilan sampel yang akan digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik non-probability sampling jenuh. Menurut sugiyono (2017:85) pengertian dari sampling jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi dijadikan sampel, hal ini dilakukan bila jumlah populasi relative kecil, kurang dari 30, atau penelitian ingin membuat generalisasi dengan kesalahan yang sangat kecil.

Instrumen Penelitian

Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan menggunakan kuisioner. Penyajian kuisioner berupa pernyataan/pertanyaan yang diperoleh dari indikator-indikator dari setiap variabel penelitian. Pengukuran kuisioner menggunakan skala likert.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 4.1
Uji Validitas

Variabel	Item	<i>Corrected Item-Total Correlation</i>	Sig.	R-tabel	Ket.
Anggaran Berbasis Kinerja (X1)	X1_1	0,521	0,3	0,274	Valid
	X1_2	0,679	0,3	0,274	Valid
	X1_3	0,509	0,3	0,274	Valid
	X1_4	0,454	0,3	0,274	Valid
	X1_5	0,584	0,3	0,274	Valid
	X1_6	0,610	0,3	0,274	Valid
	X1_7	0,583	0,3	0,274	Valid

	X1_8	0,691	0,3	0,274	Valid
--	------	-------	-----	-------	-------

Uji validitas pada variabel Anggaran Berbasis Kinerja mendapatkan hasil R-hitung diatas 0,3 yang artinya semua pernyataan dinyatakan Valid.

Variabel	Item	<i>Corrected Item-Total Correlation</i>	Sig,	R-tabel	Ket.
Sistem Pelaporan Keuangan (X2)	X2_1	0,350	0,3	0,274	Valid
	X2_2	0,477	0,3	0,274	Valid
	X2_3	0,301	0,3	0,274	Valid
	X2_4	0,385	0,3	0,274	Valid
	X2_5	0,608	0,3	0,274	Valid
	X2_6	0,568	0,3	0,274	Valid
	X2_7	0,465	0,3	0,274	Valid
	X2_8	0,478	0,3	0,274	Valid

Uji validitas pada variabel Sistem Pelaporan Keuangan mendapatkan hasil R-hitung diatas 0,3 yang artinya semua pernyataan dinyatakan Valid.

Variabel	Item	<i>Corrected Item-Total Correlation</i>	Sig,	R-tabel	Ket.
Akuntabilitas Kinerja (Y)	Y_1	0,647	0,3	0,274	Valid
	Y_2	0,620	0,3	0,274	Valid
	Y_3	0,394	0,3	0,274	Valid
	Y_4	0,469	0,3	0,274	Valid
	Y_5	0,591	0,3	0,274	Valid
	Y_6	0,520	0,3	0,274	Valid
	Y_7	0,592	0,3	0,274	Valid

Uji validitas pada variabel Kinerja Karyawan mendapatkan hasil R-hitung diatas 0,3 yang artinya semua pernyataan dinyatakan Valid.

Tabel 4.2
Uji Reliabilitas

Variabel	Nilai	Nilai	Ket
----------	-------	-------	-----

	Cronbach Alpha	Kritis	
Anggaran Berbasis Kinerja (X1)	0,739	0,6	Reliabel
Sistem Pelaporan Keuangan (X2)	0,661	0,6	Reliabel
Akuntabilitas Kinerja (Y)	0,721	0,6	Reliabel

Uji Reliabilitas diatas, diperoleh nilai koefisien reliabilitas Cronbach alpha pada variable Anggaran Berbasis Kinerja (X1) sebesar 0,739, Sistem Pelaporan Keuangan (X2) sebesar 0,661, dan Akuntabilitas Kinerja (Y) sebesar 0,721. Dari semua variable hasil nilai Cronbach alpha lebih besar > 0,6. Dapat disimpulkan jika semua pertanyaan pada instrument yang digunakan dinyatakan reliabel.

Tabel 4.3
Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test	
	Unstandardized Residual
N	34
Asymp. Sig. (2-tailed)	0,058

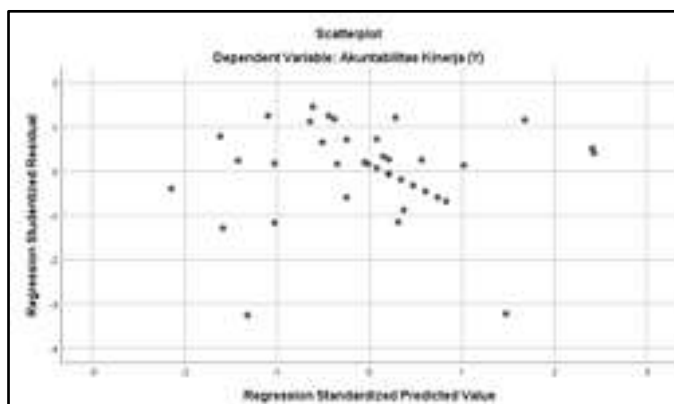
Nilai Asymp dapat ditemukan pada tabel 4.3 di atas. sebesar (0,058>0,05) dapat disimpulkan pada hasil tes diatas jika hasilnya memenuhi syarat sehingga data dapat dinyatakan berdistribusi normal.

Tabel 4.4
Uji Multikolineritas

Coefficients ^a			
Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	Anggaran Berbasis Kinerja (X1)	0,996	1,004
	Sistem Pelaporan Keuangan (X2)	0,996	1,004

Berdasarkan tabel 4.4 uji multikolineritas diatas diketahui bahwa nilai VIF untuk Anggaran Berbasis Kinerja (X1) sebesar 0,996 dan variable Sistem Pelaporan Keuangan (X2) sebesar 0,996. Masing – masing variable mempunyai nilai VIF kurang dari 10,00. Dapat disimpulkan jika regresi berganda terbebas dari gangguan Multikolineritas.

Uji Heteroskedastisitas



Gambar 2. Scatterplot

Titik-titik pada sumbu 0 dan Y tersebar secara acak, membentuk pola yang ditunjukkan pada gambar di atas. Jika model regresi tidak terjadi, maka dapat disimpulkan. Heteroskedastisitas.

Tabel 4.5
Uji Autokorelasi

Model	Durbin-Watson
1	1,839

Dari tabel 4.5 diketahui jika nilai Durbin-Watson sebesar 1,839. Sedangkan nilai d_u pada tabel 1,6000 dalam menentukan nilai dapat dilihat sebagai berikut :

$$D_u < d < 4 - d_u$$

$$1,5805 < 1,839 < 4 - 2,4195$$

Berdasarkan perhitungan diatas diketahui nilai DW sebesar 1,839 lebih besar dari nilai d_u 1,6000 dan lebih kecil dari $4 - d_u$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini tidak terdapat autokorelasi.

Tabel. 4.6
Analisis Linier Regresi Berganda

Model		Unstandardized B	T	Sig.
1	(Constant)	4,836	0,719	0,478
	Anggaran Berbasis Kinerja (X1)	0,740	4,942	0,000
	Sistem Pelaporan Keuangan (X2)	0,115	0,734	0,468

a. Dependent Variabel : Akuntabilitas Kinerja

Untuk menurunkan persamaan regresi, kita dapat menggunakan nilai pada Tabel 4.6 untuk mendapatkan besaran konstanta dan koefisien regresi masing-masing variabel :

$$Y = 4,836 + 0,740X_1 + 0,115X_2 + e$$

Berdasarkan persamaan tersebut maka dapat di deskripsikan sebagai berikut :

1. Nilai konstanta (a) sebesar 4,836, artinya apabila variabel Anggaran Berbasis Kinerja (X1) dan Sistem Pelaporan Keuangan (X2), nilainya 0 maka nilai Akuntabilitas Kinerja (Y) sebesar 4,836.
2. Nilai koefisien Anggaran Berbasis Kinerja (X1) sebesar 0, 740, artinya bahwa setiap penambahan satu-satuan akan mengakibatkan meningkatnya nilai Akuntabilitas Kinerja (Y) sebesar 0, 740.
3. Nilai koefisien Sistem Pelaporan Keuangan (X2) sebesar 0, 115, artinya bahwa setiap penambahan satu-satuan akan mengakibatkan meningkatnya nilai Akuntabilitas Kinerja (Y) sebesar 0, 115.

Tabel 4.7

Uji-t

Model	t	Sig
Anggaran Berbasis Kinerja	4,942	0,000
Sistem Pelaporan Keuangan	0,734	0,468

Berdasarkan hasil tabel 4.12 dapat disimpulkan bahwa :

1. Variabel Anggaran Berbasis Kinerja (X1) sebesar 4,942 dengan nilai signifikansi sebesar 0,030 sehingga ($0,000 < 0,05$) berpengaruh signifikan terhadap variabel Akuntabilitas Kinerja (Y), maka dapat dinyatakan bahwa hipotesis diterima.
2. Variabel Sistem Pelaporan Keuangan (X2) sebesar 0,734 dengan nilai signifikansi sebesar 0,468 sehingga ($0,468 > 0,05$) maka tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel Akuntabilitas Kinerja (Y), maka dapat dinyatakan bahwa hipotesis ditolak.

. Tabel 4.8

Uji-F

Model	F	Sig.
1 Regression	12,295	0,000b

Berdasarkan tabel diatas diperoleh nilai F-hitung sebesar 12,295 dengan nilai signifikan sebesar 0,000 sehingga ($0,000 < 0,05$). Dari hasil tersebut maka dapat dinyatakan hipotesis diterima. Artinya Anggaran Berbasis Kinerja (X1) dan Sistem Pelaporan Keuangan (X2) berpengaruh simultan terhadap Akuntabilitas Kinerja (Y).

PENGARUH PENGARUH ANGGARAN BERBASIS KINERJA TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa variabel Anggaran Berbasis Kinerja memiliki signifikansi ($0,000 < 0,05$) dalam hal ini membuktikan bahwa variabel Anggaran Berbasis Kinerja berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja dan juga ditunjukkan dari besarnya nilai 4,942 yang artinya semakin meningkatnya nilai Anggaran Berbasis Kinerja pada perhitungan maka semakin mempengaruhi Akuntabilitas Kinerja.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Rezeqiah, 2017) yang menunjukkan bahwa variabel Anggaran Berbasis Kinerja berpengaruh positif signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja, hal tersebut menunjukkan bahwa secara parsial Anggaran Berbasis Kinerja berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja. Sesuai dengan teori Menurut (Wahdatul, Rahayu, Dillak, 2016) mengemukakan bahwa : “Anggaran berbasis kinerja merupakan teknik penganggaran dalam sektor publik yang disusun untuk mengatasi berbagai kelemahan yang terdapat dalam anggaran tradisional, khususnya kelemahan yang disebabkan oleh adanya tolak ukur yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja dalam pencapaian tujuan dan sasaran pelayanan publik.”

PENGARUH SISTEM PELAPORAN KEUANGAN TERHADAP KINERJA KARYAWAN

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa variabel Sistem Pelaporan Keuangan memiliki signifikansi $0,468 < 0,05$ dalam hal ini membuktikan bahwa variabel Sistem Pelaporan Keuangan tidak berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja dan juga ditunjukkan dari besarnya nilai 0,734 yang artinya semakin meningkatnya nilai Sistem Pelaporan Keuangan pada perhitungan maka semakin mempengaruhi Akuntabilitas Kinerja.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Wahdatul dan Dillak, 2016) yang menunjukkan bahwa variabel Sistem Pelaporan Keuangan berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja, hal tersebut menunjukkan bahwa secara parsial Sistem Pelaporan Keuangan berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja. Sesuai dengan teori Menurut (Mulyadi, Syamsidar, Efendy, 2018) “Sistem pelaporan merupakan laporan yang digunakan untuk mempertanggung jawabkan dari bawahan kepada atasan. Sistem pelaporan yang baik diperlukan agar dapat memantau dan mengendalikan kinerja dalam mengimplementasikan anggaran yang telah diterapkan. Agar dapat memantau hasil kerja dan pertanggungjawaban diperlukan sebuah sistem pelaporan. Dalam laporan harus ditunjukkan hasil kerja pusat pertanggungjawaban beserta anggarannya, sehingga dapat diketahui penyimpangan terhadap anggaran. Agar bisa lebih manfaat

dengan analisis tentang penyebab timbulnya penyimpangan. Dapat dikatakan bahwa sistem pelaporan akan mempengaruhi efektivitas dan efisiensi sistem pengendalian Akuntansi.”

PENGARUH ANGGARAN BERBASIS KINERJA DAN SISTEM PELAPORAN KEUANGAN TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA

Hasil hasil penelitian variabel Anggaran Berbasis Kinerja (X1) dan Sistem Pelaporan Keuangan (X2) berpengaruh secara simultan terhadap Akuntabilitas Kinerja (Y). dapat dilihat pada hasil uji F diperoleh nilai f-hitung sebesar 18,324 dengan nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$. Artinya bahwa karyawan pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur akan mendapatkan peningkatan Akuntabilitas Kinerja karena faktor Anggaran Berbasis Kinerja dan Sistem Pelaporan Keuangan.

Hasil ini sejalan dengan penelitian terdahulu milik (Wahdatul dan Dillak, 2016) yang menyatakan jika Anggaran Berbasis Kinerja dan Sistem Pelaporan Keuangan berpengaruh secara simultan terhadap Akuntabilitas Kinerja. Sesuai dengan teori yang menyebutkan bahwa Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan/hukum/pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk menerima keterangan atau pertanggungjawaban. Akuntabilitas merupakan konsep yang lebih luas dari stewardship. Stewardship mengacu pada pengelolaan atas suatu aktivitas secara ekonomis dan efisien tanpa dibebani oleh kewajiban untuk melaporkan, sedangkan akuntabilitas mengacu pada pertanggungjawaban oleh seorang steward kepada pemberi tanggung jawab. Pelaporan ini merupakan wujud dari proses akuntabilitas kinerja, (Mulyadi, Syamsidar, Efendy, 2018).

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis mengenai pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja dan Sistem Pelaporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur dapat disimpulkan jika :

- a. Anggaran Berbasis Kinerja berpengaruh signifikan ($0,030 < 0,05$) terhadap Akuntabilitas Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur. Hal tersebut menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan, sehingga hipotesis data dapat diterima dan terbukti kebenarannya.
- b. Sistem Pelaporan Keuangan berpengaruh signifikan ($0,468 < 0,05$) terhadap Akuntabilitas Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur. Hal tersebut menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan, sehingga hipotesis data ditolak.
- c. Anggaran Berbasis Kinerja dan Sistem Pelaporan Keuangan berpengaruh secara simultan terhadap Akuntabilitas Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur. Hal

tersebut menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan, sehingga hipotesis data dapat diterima dan terbukti kebenarannya.

IMPLIKASI

Hasil penelitian ini digunakan sebagai masukan Perusahaan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur dalam melihat sudut pandang lain. Peneliti juga berharap semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi peneliti dimasa depan.

KETERBATASAN PENELITIAN

Pada penelitian ini terdapat penggabungan variabel independent dan dependen yang sebelumnya belum pernah terjadi. Peneliti sedikit kesusahan dalam mencari refrensi penelitian terdahulu.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhi, Kuncoro, Abdul Hakim, & Mochammad Makmur. (2019). Proses Perencanaan Anggaran Berbasis Kinerja Pada Politeknik Pembangunan Pertanian Malang. *Jurnal Profit*, 13(1), 47-62.
- Hermanto, Cahya Budi. (2020). Pengaruh Perencanaan, Pelaksanaan, Monitoring, dan Evaluasi, dan Pertanggungjawaban Anggaran dengan Implementasi Anggaran berbasis Kinerja terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Survey di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. *Jurnal Akrab Juara*, 5(3), 40–56.
- Kertiani, Ni Made, Ni Putu Ayu Kusumawati, & Putu Cita Ayu. (2020). Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Pada Kantor Dinas Pemeirntah Kabupaten Badung. *Hita Akuntansi Dan Keuangan*, 204–222.
- Nuraini, Fadhillah, Kiagus Andi, Yunia Amelia, & Fitria Dharma. (2019). Perbandingan Kinerja Keuangan Pemerintah Propinsi di Indonesia (Studi pada Provinsi di Jawa dan di Sumatera). *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 24(1), 23-35.
- Rezeqiah, Ana Muchlisa. (2017). Pengaruh Anggaran berbasis Kinerja terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Kasus pada Badan Perencana Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan). Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Muhammdiyah Palembang: Palembang.
- Verasvera, Febrina Astria. (2016). Pengaruh Anggaran berbasis Kinerja terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah (Studi Kasus pada Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat). *Jurnal Manajemen Maranatha*, 15(2), 137–162.
- Wahdatul, Laura, Sri Rahayu, Vaya Juliana Dillak. (2016). Pengaruh Anggaran berbasis Kinerja dan Sistem Pelaporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Bandung. *E-Proceeding of Management*, 3(2), 1560–1565.

Yuliani, Nur Laila & Barkah Susanto. (2016). Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah dan Penerapan Anggaran berbasis Kinerja terhadap Akuntabilitas Publik. *Syariah Paper Accounting FEB UMS*, 301–312.

Yuniarti, Rina. (2005). Pengaruh Sistem Akuntansi Pemerintah dan Sistem Pelaporan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Bengkulu. *Jurnal Ekombis Review*, 39-50.